



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **F.X. NUGROHO SETIJO NAGORO**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **495159**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.755.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, Rp. 425.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.434 m2/25 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.200.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 276.900.000**

1. MOTOR, YAMAHA IKP A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000
2. MOTOR, BAJAJ PULSAR 220 DTS-IF Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOTOR, HONDA CBR250RB MIT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA - MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



5. MOTOR, VESPA P 150 X EXCLUSIF Tahun 2000, HASIL SENDIRI
Rp. 4.200.000
6. MOBIL, BMW 325 I A E46 AT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000
7. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000
8. MOTOR, YAMAHA NMAX 2025 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	48.120.257
F. HARTA LAINNYA	Rp.	552.000.000
Sub Total	Rp.	3.632.220.257
III. HUTANG	Rp.	444.088.521
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.188.131.736

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.